

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori Penelitian

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang membuat masyarakat tersebut berinisiatif untuk memulai suatu kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi. Pemberdayaan masyarakat akan terjadi apabila masyarakat tersebut ikut dalam berpartisipasi¹. Sedangkan masyarakat islam adalah sekelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni islam.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang seberrnyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. 15 Pemberdayaan masyarakat juga di artikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.

Pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusi adalah upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat. Masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih suatu yang bermanfaat bagi dirinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan yang jelas dan berkualitas.

Jadi, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran islam dalam kehidupan keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam karya yang baik, dengan sebagai pemecah masalah yang dihadapi masyarakat².

¹ Sukiman Rahim dan Dewi Wahyuni K Baderan, *Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017),1.

² Dr. Agus Ahmad Safei, M.Ag., dkk., *Pengembangan Masyarakat Perspektif Islam dan Barat* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 5-10.

Menurut *Sumodiningrat* menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat ditandai adanya kemandiriannya yang dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan untuk mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dari pembangunan. Tujuan dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Sulistiyani menjelaskan bahwa secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar “*daya*” yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian diatas, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya. Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya terhadap masyarakat yang lemah agar dapat mengidentifikasi, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahan dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki³.

Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas tentang pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Firman Allah SWT dalam QS. Fussilat: 10

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبُرُكٌ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّالِفِينَ

Artinya: Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan memberkahinya dan Dia menempatkan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat

³ Kesi Widjajanti, “*Model Pemberdayaan Masyarakat*”, (Semarang: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12, No 1), 16.

masa, memudai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukan. (QS. Fussilat ayat 10)

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto tujuan pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi enam:

a. Perbaikan kelembagaan

Dengan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk dengan pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada. Sehingga lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Dengan tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai.

b. Perbaikan usaha

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan maka diharapkan adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. dengan harapan mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga dan juga memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan.

c. Perbaikan pendapatan

Dengan perbaikan bisnis diharapkan akan dapat memperoleh peningkatan pendapatan, termasuk pendapatan masyarakat.

d. Perbaikan lingkungan

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila kualitas intelektual manusia baik, maka manusia tidak akan merusaknya.

e. Perbaikan kehidupan

Kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Antara lain tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan atau jual beli. Dengan pendapatan yang membaik diharapkan keadaan lingkungan juga ikut membaik.

f. Perbaikan masyarakat

Jika setiap keluarga ingin memiliki kehidupan yang baik, maka kehidupan kelompok masyarakat juga akan ikut membaik. Kehidupan yang baik berarti didukung oleh lingkungan fisik dan sosial.

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat empat prinsip yang berfungsi agar pemberdayaan yang dilakukan dapat sukses, diantaranya yakni:

a. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang, pada prinsip ini ada kesetaraan dan kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Masing-masing individu harus saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling membantu, saling bertukar pengalaman dan saling memberikan dukungan.

b. Partisipasi

Program yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif. Dengan arti masyarakat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan sehingga mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, dan mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dengan potensi yang ada pada masing-masing individu.

c. Kemandirian

Prinsip ini adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Dalam prinsip ini tidak melihat orang miskin sebagai objek yang tidak mampu tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Dengan demikian individu dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan mampu memecahkan masalah hidupnya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya dan tidak bergantung terhadap pihak manapun.

d. Berkelanjutan

Pada dasarnya program pemberdayaan harus memiliki tujuan yang berkelanjutan. Ia harus secara perlahan memberikan masyarakat peran yang dominan terhadap pemberdayaan bukan lagi pendamping yang berperan dominan. Dengan arti masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling

menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip ukhuwwah, Prinsip ta'awun, dan Prinsip persamaan derajat, Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan di bawah ini. prinsip ukhuwwah. Ukhuwwah dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah SWT Al Hujarat 49;10

□ نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

4. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soekanto tahapan pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi tujuh bagian, diantaranya yaitu:

- a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini terbagi menjadi dua bagian, yang pertama penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelompok yang berkerja. Dan yang ke dua penyiapan lapangan yang dilakukan secara nondirektif.
- b. Tahap pengkajian

Dalam tahapan ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, sehingga program ini tidak salah sasaran yang artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti pemberdayaan masyarakat.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Secara partisipatif tahapan ini melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
- d. Tahap pemformalisasi rencana aksi

Tahapan ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa saja yang mereka akan lakukan untuk mengatasi problem yang ada.

- e. Tahap implementasi program atau kegiatan
Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, masyarakat dapat menjaga keberlangsungan program yang dikembangkan. Dengan arti kerjasama antar petugas dengan masyarakat agar mencapai tujuan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala.
- f. Tahap evaluasi
Tahap evaluasi ini diharapkan secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dicapai, sehingga diketahui Kendal-kendala berikutnya dapat diantisipasi untuk pemecahan permasalahan.
- g. Tahap terminasi
Tahapan ini merupakan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Artinya masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi dan kondisi sebelumnya⁴.

5. Pengertian Hutan Mangrove

Hutan mangrove merupakan salah satu jenis vegetasi pantai tropis yang identik pada kawasan lembab dan berlumpur serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Terdapat berbagai istilah mengenai mangrove, seperti hutan bakau, pantai, maupun payau. Istilah hutan pantai muncul karena tumbuhan ini berkembangbiak dengan baik di pesisir pantai. Sementara itu, istilah hutan payau maupun bakau dikarenakan pohon ini juga hidup pada tanah aluvial. Nyakkben mengemukakan bahwa hutan mangrove adalah istilah umum bagi ekosistem pesisir tropis yang identik dengan tumbuhan yang mampu hidup subur di air asin.⁵

Kata mangrove berakar dari kata “mangal” yang bermakna suatu tumbuhan kelompok, individu spesies.⁶ Tumbuhan mangrove dapat hidup pada pantai karang maupun dataran koral yang berlapis lumpur. Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis, dan merupakan komunitas yang hidup di dalam kawasan yang lembab dan berlumpur serta di pengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Selain itu, mangrove memiliki akar unik yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap oksigen secara langsung

⁴ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 8-14.

⁵ Erna Rochana, “*Ekosistem Mangrove Dan Pengelolaan di Indonesia*,” Di akses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 10:33, www.irwantoshut.com

⁶ Sukiman Rahim dan Dewi Wahyuni K Baderan, *Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 1.

dari permukaan air. Akar mangrove dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe sebagai berikut:

- a. Akar batang merupakan varian cabang batang yang mencapai substrat.
- b. Akar lutut adalah akar tali yang berubah membengkok saat berkembang menuju substrat.
- c. Akar ceker ayam merupakan akar kabel yang menjulang 10-30 cm dari substrat.
- d. Akar papan merupakan akar yang mulanya menyerupai akar batang, kemudian melebar dan menjadi rata.
- e. Akar yang menjuntai ke bawah dari batang atau cabang bawah. Namun, biasanya akar ini tidak mencapai substrat.

Adanya pengelolaan mangrove oleh masyarakat dan penanaman mangrove oleh lembaga pemerintahan maupun LSM dan mahasiswa menjadikan mangrove di Desa Banggi Kabupaten Rembang lebih baik dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Melalui Kelompok Tani Sido Dadi Maju (KTSM) bersama pemerintah membentuk berbagai program dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Banggi. Hal ini tidak lain bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan memberdayakan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini dapat mengembalikan fungsi ekosistem tumbuhan mangrove.⁷ Namun, aktivitas tersebut tidak menjamin perlindungan mangrove di desa tersebut dari aktivitas masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar mangrove untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Eksploitasi habitat mangrove secara terus-menerus dapat membatasi keanekaragaman jenis tumbuhan yang memiliki nilai ekologis dan sosial ekonomi. Maka untuk mengelola kawasan mangrove secara berkelanjutan, pengetahuan tentang keanekaragaman jenis tumbuhan di ekosistem mangrove Kawasan Pasar Banggi Rembang harus digali.⁸

Sementara itu, vegetasi mangrove diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu vegetasi utama, pendukung dan asosiasi. Vegetasi hutan tumbuh sesuai dengan keadaan lingkungannya, dengan vegetasi hutan sebagai contohnya. Dalam Tumbuhan mangrove

⁷ Saiful Mudjab, *“Partisipasi Masyarakat Dalam Restorasi Hutan Mangrove Studi Deskriptif Kualitatif Program Partisipasi Masyarakat Melalui Kelompok Tani Sido Dadi Maju Desa Banggi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang,”* Di akses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 11:33, <http://eprints.ums.ac.id/51970/>

⁸ Martuti, *“Keanekaragaman Mangrove Di Wilayah Tapak Tugurejo Semarang,”* vol .36, No.2, 2013, Hal.124

sendiri terdapat 12 genera yang beragam, namun terdapat berbagai gendera yang cukup menonjol yaitu *Rhizophora*, *Avicennia*, *Bruguiera*, dan *Sonneratia*. Dalam kehidupan manusia mangrove memiliki peran yang cukup signifikan baik secara fisik, kimia dan biologii.⁹

Secara global ekosistem mangrove sangat berperan dengan cukup signifikan. Menyelamatkan mangrove mencegah pelepasan setidaknya tiga miliar metrik ton karbon ke atmosfer. Hutan mangrove saja dapat menyimpan karbon empat kali lebih banyak di dalam tanah daripada hutan biasa. Maka dapat dipahami bahwa keberadaan mangrove memberikan.¹⁰

Pesisir pantai barat Desa Pasar Banggi Kabupaen Rembang tumbuhan mangrove dapat bekemang dengan optimal. Pada tanah aluvia ekosistem tumbuh dengan subur. Sehingga dapat difungsikan sebagai pengahalan terjadinya abrasi. Selain itu, juga mempengaruhi hasil produksi ikan, destinasi wisata dan mencegah erosi di Desa Pasar Banggi kabupaten Rembang.¹¹

6. Pengembangan Wisata Hutan Mangrove

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengembangan cara, proses mengembangkan terhadap yang ingin dicapai. Sunaryo mengemukakan bahwa terdapat berbagai komponen yang harus diperhatikan dalam mengembangkan wisata, yaitu:

- a. Objek dan daya tarik, meliputi daya tarik alam, budaya, atau buatan manusia (*artificial/ special interst*)
- b. Aksesibilitas, mencakup bantuan untuk rute transit, terminal, bandara, pelabuhan, dan modalitas lainnya.
- c. Amenitas, mencangkup fasilitas pendukung wisata seperti biro, penginapan, perbelanjaan dan sebagainya.
- d. Sarana pendukung, seperti bank, klinik, dan sebagainya.
- e. Kelembagaan, atau keberadaan dan fungsi masing-masing faktor dalam mempertahankan operasional wisata, termasuk masyarakat tuan rumah.

⁹ Sukiman rahim dan Dewi Wahyuni K Baderan, "*Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya*", (Yogyakarta: Group Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2017), hal 2-4

¹⁰ Dewi Wahyuni K Baderan, "*Serapan Karbon Hutan Mnagrove Gorontlo*", (Yogyakarta: Group Penerbitan CV BUDI UTAMA , 2017), hal 5

¹¹ Muh Aris Marfai Dkk, "*Kajian Daya Dukung Dan Ekosistem Pulau Kecil Studi Kasus Pulau Pari*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2018), hal 117

Sementara itu, dalam mengembangkan suatu wisata perlu memerhatikan berbagai strategi. Adapun strategi tersebut meliputi:

a. Pengembangan sarana dan prasarana

Wisatawan sebutan untuk orang yang suka bepergian ke lokasi atau daerah yang asing bagi mereka. Maka wisatawan sebelum berpergian perlu sarana dan prasarana seperti akomodasi, fasilitas perbelanjaan dan seagainya.

b. Strategi promosi Kegiatan

Aktivitas promosi merupakan aktivitas yang *urgent* dalam pengembangan pariwisata. Dinas Pariwisata dan kebudayaan salah satu lembaga yang berkontribusi dalam mempromosikan potensi wisata di wilayahnya.

c. Pengembangan Infrastruktur

Infrastruktur dasar merupakan salah satu kegiatan yang *urgent* guna memperkuat pengembangan wisata. Seperti jaringan telekomunikasi, jalan, air dan sebagainya. Adanya teknologi yang tinggi harus mampu dioptimalkan guna menghindari rusaknya ekosistem dan rusaknya pemandangan yang bertolak belakang dengan konfigurasi ekosistem di sekelilingnya.¹²

7. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung mau pun tidak langsung. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) dalam buku Standart Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah: “Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi

¹² Novalina Sagala dan Imelda Regina Pellokila, SE.,MM, “Jurnal Tourism”, *Srategi Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Di Kawasan Pantai Oesapa*, no.01 (2019):4-5

seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Ada definisi lain mengenai pendapatan yaitu pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan.

Menurut Sukirno pendapatan dapat dihitung melalui tiga cara yaitu:

- a. Cara pengel uaran, cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran / perbelanjaan ke atas barang – barang dan jasa.
- b. Cara produksi, cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan.
- c. Cara pendapatan, dalam perhitungan ini pendapatan diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima.

Sementara itu, dalam menunjang pengembangan wisata mangrove perlu memahami partisipasi pengunjung, hal ini dapat diketahui melalui karakteristik pengunjung. Dalam hal ini peneliti berhasil mengumpulkan data karakteristik wisatawan melalui aspirasi dan prepsesi mengenai pengembangan wisata mangrove. Selain itu, kontribusi masyarakat juga sangat dibutuhkan. Kesuksesan rehabilitas dan konservasi wisata mangrove di Desa Pasar Banggi tidak lepas dari kontribusi masyarakat di sana. Kelompok Tani Sido Maju telah berkontribusi dan mendukung konservasi ini sejak tahun 1972. Antusias ini masyarakat tentunya tidak lepas juga dari kontribusi tokoh masyarakat yang senantiasa memotivasi. Namun hal ini juga tidak lepas dari pihak pemerintah yang selalu mmemberikan berbagai bantuan guna melakukan rahabilitas, penyulusan dan pelatihan mengenai pengelolaan hutan mangrove.

8. Analisis Participatory Rapid Appraisal (PRA)

Participatory Rapid Appraisal (PRA) artinya “Pemahaman Kondisi Pedesaan Secara Partisipatif”, merupakan pendekatan yang merumuskan perencanaan dan kebijakan di wilayah pedesaan dengan cara melibatkan masyarakat seefektif mungkin.¹³ Secara harfiah metode

¹³ Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal Dalam Mendukung Implementasi

Participatory Rapid Appraisal (PRA) diartikan sebagai pengkajian pedesaan dan atau pesisir secara partisipatif. Participatory Rapid Appraisal (PRA) merupakan penyempurnaan dari Rapid Rural Appraisal (RRA) atau penilaian keadaan secara partisipatif.¹⁴ Berbeda dengan Rapid Rural Appraisal (RRA) yang dilakukan oleh (sekelompok) tim yang terdiri dari “orang luar”, Participatory Rapid Appraisal (PRA) dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua stakeholders (pemangku kepentingan kegiatan) dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai “nara sumber” atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang “menggurui”. Participatory Rapid Appraisal (PRA) merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif, yang dilakukan pada tahapan awal perencanaan kegiatan. Melalui Participatory Rapid Appraisal (PRA) dilakukan kegiatan-kegiatan:

- a) Pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan.
- b) Analisis keadaan.
- c) Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan (dapat dilaksanakan, efisien, dan diterima oleh sistem sosialnya).
- d) Rincian tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program/kegiatan yang akan diusulkan/direkomendasikan.

Participatory Rural Appraisal (PRA) memiliki tujuan akhir, yaitumenjaring program pembangunan pedesaan secara tepat dan sesuai dengansyarat. Syarat yang tidak boleh ditawar harus memiliki banyak keuntungan, baik untuk masyarakat sendiri dan lingkungan sekitar. Berikut beberapa syarat penjangingan program pembangunan pedesaan

Undang-Undang Pemerintahan Desa”, *Journal Lingkar Widya*, 29 Maret 2022, 40

¹⁴ Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) Dan Participatory Rural Appraisal (PRA)”, Jakarta, Desember 2006, 3.

- a) Diterima oleh masyarakat setempat
- b) Menguntungkan secara ekonomi.
- c) Memberikan dampak positif untuk lingkungan

Tujuan Participatory Rural Appraisal (PRA) pada prinsipnya ingin memberdayakan dan menguatkan ekonomi masyarakat. Khususnya masyarakat yang dianggap masih kurang mampu. Dengan adanya metode PRA akan terjadi perubahan status sosial dan dapat menyejahterakan masyarakat itu sendiri.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tabel:

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Putri Intan Kinasih dan Hartutik Purnaweni, Pemanfaatan Mangrove Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Wilayah pesisir dan lautan di Indonesia mengandung potensi sumberdaya alam yang melimpah, namun sekaligus juga menyimpan permasalahan yang perlu ditangani secara terintegrasi dan terpadu, yang membutuhkan peran administrasi publik dalam pengelolaannya. Mangrove yang tumbuh di wilayah pesisir membutuhkan peran masyarakat pesisir, yang dalam pelaksanaannya	Variabelnya sama-sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat hutan mangrove.	Tempat atau lokasi yang diteliti berbeda.

		<p>mebutuhkan pemberdayaan. Dengan pemberdayaan masyarakat lokal maka keberlanjutan wilayah pesisir akan makin terjaga, karena selain melakukan konservasi mereka juga memperoleh manfaat sosial ekonomi untuk kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian direkomendasikan pengelolaan wilayah pesisir yang komprehensif¹⁵.</p>		
	<p>Komang Dean Ananda,dkk, Peran Balai Penglolaan Hutan Mangrove Wilayah I Bali Dalam Penglolaan Hasil Hutan Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Menjaga kelestarian dan keberlanjutan vegetasi Mangrove Tahura Ngurah Rai, melalui pemanfaatan potensi biotik mangrove. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengolahan terhadap Hasil</p>	<p>Variabelnya sama-sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat hutan mangrove.</p>	<p>Dalam pemanfatan hutan mangrove di penelitian Komang Dean Ananda dkk, yaitu fokus pada pengolahan produk makan.</p>

¹⁵ Putri Intan Kinasih dan Hartutik Purnaweni, “Pemanfaatan Mangrove Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”, vol.1, No.1, 2019, Hal. 77

	Lokal.	Hutan Bukan Kayu (HHBK) mangrove, yaitu dapat berupa buah maupun daunnya. Adapun jenis <i>Sonneratia caseolaris</i> , <i>Bruguiera gymnorhiza</i> , <i>Xylocarpus granatum</i> merupakan beberapa buah yang dapat dimanfaatkan menjadi sirup, dodol, sabun, tepung, beras, dan lula ¹⁶ .		
	Dara Nery Saputri, Pengaruh Pemanfaatan Hutan Mangrove Sebagai Sumber Belajar IPA Terhadap Sikap Peduli Lingkungan Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Kota	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan hutan mangrove sebagai sumber belajar IPA terhadap sikap peduli lingkungan siswa kelas IV SD Kota Bengkulu ¹⁷ .	Sama-sama membahas soal pemanfaatan hutan mangrove	Dalam pemanfaatan hutan mangrove oleh Dara Nery Saputri lebih menjuru sebagai sumber belajar bagi SD Kota Bengkulu kelas IV

¹⁶ Komeng Dean Ananda dkk, “Peran Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I Bali Dalam Pengelolaan Hasil Hutan Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal”, Vol.13, No.3, 2019, Hal.338

¹⁷ Dara Nery Saputri, “Pengaruh Pemanfaatan Hutan Mangrove Sebagai Sumber Belajar IPA Terhadap Sikap Peduli Lingkungan Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Kota Bengkulu”, (Skripsi, Universitas Bengkulu, 2018), <http://repository.unib.ac.id/18588/1/SKRIPSI%20A1G014008.pdf>

	Bengkulu.			IPA
	Hamdani, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran.	Kurangnya pengetahuan dan perhatian dari pemerintah sehingga membuat masyarakat menyalahgunakan fungsi mangrove sesungguhnya sehingga hutan mangrove menjadi rusak. Dari fenomena tersebut pihak LSM Mitra Bentala melakukan pendampingan bagi masyarakat Desa Gebang agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk menjaga kelestarian hutan mangrove ¹⁸ .	Sama-sama membahas melestarikan hutan mangrove.	Perbedaan yang ada dalam skripsi ini tidak memebrikan penjelasan tentang pemanfaatan hutan mangrove yang dimiliki
	Inggi Putri, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Kawasan	Kawasan hutan mangrove merupakan salah satu kawasan pantai yang memiliki	Sama-sama ingin menjadikan tempat tersebut bermanfaat	Perbedaan yang ada dalam skripsi ini lebih focus terhadap

¹⁸ Hamdani, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.unib.ac.id/18588/1/SKRIPSI%20A1G014008.pdf>.

Hutan Mangrove Sebagai Objek Daya Tarik Wisata (Studi Kasus Di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat.	keunikan dan kekhasan tersendiri karena keberadaan ekosistem ini berada pada tempat terjadinya pelumpuran dan akumulasi bahan organik ¹⁹ .	bagi masyarakat sekitar.	partisipasi masyarakat dalam pelestarian
---	---	--------------------------	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah kerangka konseptual pemecahan masalah yang telah diartikulasikan. Adanya kerangka berfikir dapat memberikan penjelasan menyeluruh tentang faktor - faktor yang diteliti. Dengan demikian uraian kerangka berfikir membantu memandu penelitian tentang teknik perekrutan kompetitif untuk meningkatkan kinerja, ide studi akan diuraikan.²⁰

Strategi merupakan perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun, untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Pemberdayaan hutan mangrove merupakan kegiatan untuk mengembakan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang, atau menciptakan yang baru. Sehingga pemberdayaan hutan mangrove dapat mewujudkan keterpaduan dalam menggunakan berbagai sumber daya pariwisata mengintergrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Melalui strategi yang direncanakan untuk mengembangkan pariwisata yang dapat

¹⁹ Inggi Putri, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove Sebagai Objek Daya Tarik Wisata (Studi Kasus Di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat)*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), <http://repository.ummat.ac.id/395/1.COVER-BAB%20III.pdf>.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) 92

meningkatkan objek dan daya tarik pariwisata tersebut. Di bawah merupakan gambaran kerangka berfikir pemberdayaan hutan mangrove.

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, kita dapat memperoleh gambaran penelitian yang akan dilaksanakan. Di bawah merupakan gambaran Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemanfaatan Hutan Mangrove Oleh Kelompok Tani Sido Dadi Maju Di Desa Banggi Rembang.

Gambar 2.1

